

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PPN ATAS TRANSAKSI
JUAL BELI GAS BUMI (PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR:
PUT-3362/B/PK/PJK/2020)**

Eveline Julieta Dortia Sianipar

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Tidak semua konsumsi barang dan jasa dikenakan PPN, salah satu pengecualian pengenaan PPN adalah terhadap Gas Bumi yang merupakan jenis barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil dari sumbernya sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak (UU PPN) dan PMK-252/2012 (PMK). Praktikanya, pengenaan PPN yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum, contohnya adalah pada yang terjadi pada kasus pajak antara PT. Perusahaan Gas Negara melawan Direktorat Jenderal Pajak. Dimana pada Putusan banding, Pengadilan Pajak telah mengabulkan permohonan PT. Perusahaan Gas Negara namun kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali sehingga PT. Perusahaan Gas Negara harus membayar PPN yang sangat besar. Rumusan masalah dalam Tesis ini adalah bagaimana pemberlakuan PPN atas penyaluran gas bumi dipandang dari hukum perpajakan di Indonesia dan bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor PUT-3362/B/PK/PJK/2020. Metode penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis. Hasil pembahasan dari rumusan masalah pertama adalah pemberlakuan PPN atas penyaluran gas sebenarnya sudah diatur dalam UU PPN dan PMK yang telah mengecualikan gas bumi hasil tambang dari kualifikasi objek PPN. Hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua adalah pertimbangan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali adalah kurang tepat karena seharusnya Gas Bumi tidak dikenakan PPN karena Gas Bumi tersebut tidak menambah value added dan karena proses pengangkutan Gas Bumi melalui pipa seharusnya dianggap menjadi satu kesatuan atas penjualan gas bumi karena proses tersebut hanya satu-satunya cara untuk menjual gas bumi sehingga pipa transmisi gas bumi sebenarnya hanyalah perantara dalam prosedur penjualan gas bumi bukan objek jasa yang dibebankan PPN.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Transaksi, Jual Gas Bumi

LEGAL ANALYSIS OF VAT IMPOSITION FOR NATURAL GAS SALE AND PURCHASE TRANSACTION (JUDICIAL REVIEW DECISION NUMBER: PUT-3362/B/PK/PJK/2020)

Eveline Julieta Dortia Sianipar

Abstract

Value Added Tax (VAT) is a tax on the consumption of goods and services in the Customs area which is imposed in stages in each production and distribution channel. Not all consumption of goods and services is subject to VAT, one of the exceptions to the imposition of VAT is Natural Gas, which is a type of mining or drilling product taken from its source as stipulated in Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Tax (VAT Act) and PMK-252/2012 (PMK). In practice, the imposition of VAT imposed by the Directorate General of Taxes does not provide a sense of legal certainty and legal justice, an example is what happened in the tax case between PT. State Gas Company against the Directorate General of Taxes. Where in the appeal decision, the Tax Court has granted PT. Perusahaan Gas Negara but then the Directorate General of Taxes submitted a request for judicial review and the Supreme Court granted the request for review so that PT. The State Gas Company has to pay a very large amount of VAT. The formulation of the problem in this thesis is how the application of VAT on the distribution of natural gas is viewed from tax law in Indonesia and how is the legal analysis of the Judicial Review Decision Number PUT-3362/B/PK/PJK/2020. The research method in this thesis uses normative juridical research methods. The results of the discussion from the first problem formulation is that the application of VAT on gas distribution has actually been regulated in the VAT and PMK Laws which have excluded natural gas from mining products from qualifying for VAT objects. The results of the discussion from the second problem formulation are that the legal considerations in the Review Decision are inappropriate because Natural Gas should not be subject to VAT because Natural Gas does not add value added and because the process of transporting Natural Gas through pipes should be considered as an integral part of natural gas sales because the process This is the only way to sell natural gas, so that natural gas transmission pipelines are actually only intermediaries in the natural gas sales process, not service objects subject to VAT.

Keywords: *Value Added Tax, Transactions, Selling Natural Gas*